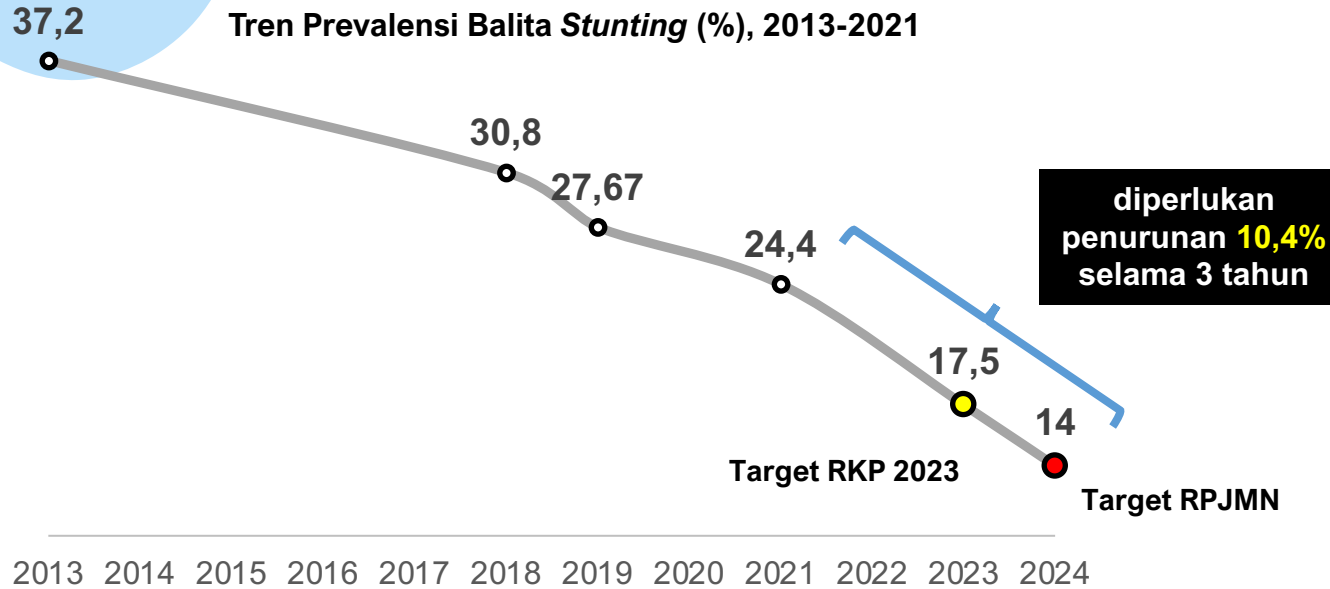


DAK Lintas Sektor dalam Penurunan Stunting : Refleksi dan Penguatannya

Subandi Sardjoko
Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat dan Kebudayaan
Kementerian PPN/Bappenas



Evaluasi Perkembangan Percepatan Penurunan Stunting Indonesia



- Prevalensi balita *stunting* nasional: **24,4 persen (5,33 juta balita)**
- Dalam 8 tahun, ***stunting* menurun secara konsisten**
 - Rata-rata penurunan: **1,6% per tahun**
 - Tahun 2019-2021 *stunting* turun **3,3% atau 1,65% per tahun**
 - Jumlah balita *stunting* (2021) mencapai **5,3 juta orang**
- Perlu percepatan **penurunan *stunting* 10,4% dalam 3 tahun** (atau **3,5% per tahun**) untuk mencapai target RPJMN

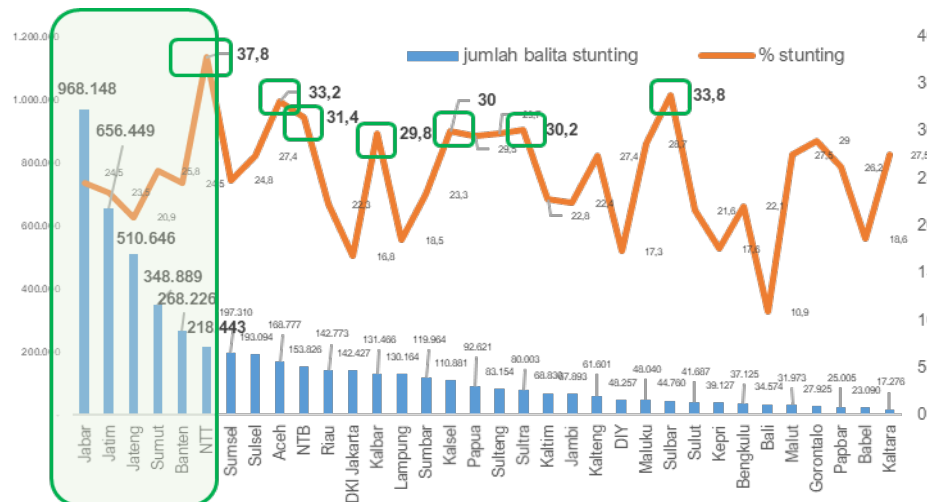
Penurunan *Stunting* sebagai Prioritas Nasional

- RPJMN 2020-2024, RKP 2021, RKP 2022, RKP 2023:**
 - Sebagai **Proyek Prioritas**
 - Sebagai **Major Project**

Target:

- RPJMN : 14% di 2024**
- RKP 2023: 17,5%**

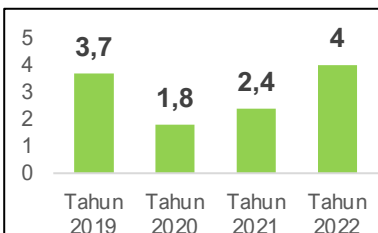
Lebih dari **separuh kasus *stunting* nasional (69% atau 3,66 juta balita)** terjadi di **12 provinsi**



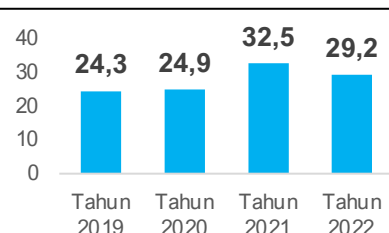
Pendanaan Stunting dalam Belanja K/L cukup Besar

- Daerah masih **tergantung pada APBN** (belanja KL & DAK) dalam penurunan *stunting*
- Intervensi belum sepenuhnya ditujukan pada kelompok sasaran prioritas**, yaitu remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, anak bawah dua tahun (baduta), ibu menyusui, dan balita
- Perlu **fokus pada *evidence based*** berdaya ungkit tinggi

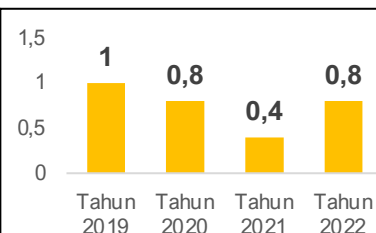
Intervensi Spesifik



Intervensi Sensitif:



Dukungan & Koordinasi:



Kegiatan yang menysasar penyebab langsung *stunting*

Kegiatan prioritas lain yang mendukung penurunan *stunting*

Penguatan **tata kelola**

dalam miliar Rupiah

No	K/L	2019	2020	2021	2022
1	Kemenkes	6.675,10	4.527,4	7.354,16	8.261,99
2	BKKBN	93,4	56,75	74,67	810,44
3	Kemensos	16.945,10	20.630,02	26.948,577	23.333,3
4	Kemenag	10,1	5,59	12,9	31,13
5	KemenPUPera	4.760,60	1.815,47	576,41	1.352,46
6	Kemendikbud	52,5	3,63	6,69	25,47
7	Kemenko PMK	0,8	0,92	0,5	1,25
8	Kemensetneg	46,8	50,79	54,25	25,59
9	Kemendagri	12,1	24,42	26,08	7,35
10	KemenPPN/Bappenas	0,8	15,34	17,2	0,7
11	Kemendes PDDT	7,7	3,5	5	0,8
12	Kementan	284	56,53	112,68	137,1
13	KKP	32,2	19,5	71,38	15,17
14	Kemenkominfo	27,6	14	11	14,9
15	BPOM	60,1	53,48	58,41	130,09
16	Kemenperin	1,2	1,58	-	-
17	KemenPPPA	1,6	1,18	1,05	2,63
18	BPS	221,3	242,88	-	-
19	Batan	13,8	0,31	0,25	-
20	BPPT	-	2,68	2	-
21	BNPP	-	-	0,85	0,7
Jumlah		29.246,80	27.526,05	35.334,10	34.151,14

6 K/L dengan intervensi kunci

5 K/L koordinasi

K/L dengan penajaman intervensi

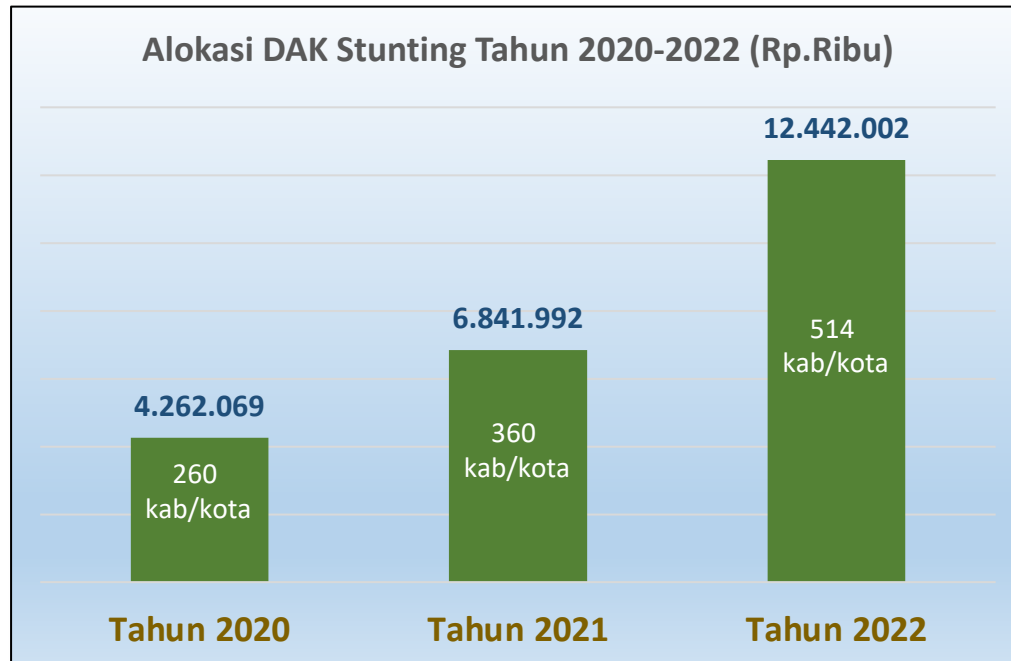
● KL dengan Intervensi Spesifik

● KL dengan Intervensi Sensitif

● KL dengan Dukungan & Koordinasi

Pendanaan Stunting dalam DAK cukup Besar

Tabel Perkembangan Alokasi DAK Stunting di Kab./Kota Lokus Tahun 2020-2022



- Trend alokasi DAK yang mendukung percepatan penurunan stunting di kabupaten/kota lokus pada tahun 2020-2022 **terus meningkat secara signifikan setiap tahun**
- Peningkatan anggaran belum disertai dengan pelaksanaan konvergensi yang optimal di daerah

Kegiatan yang di-Dukung melalui DAK Linsek Stunting Hingga Tahun 2022

1 Bantuan Operasional (BO) Stunting

- Pendampingan sasaran:
 - Tata Kelola Koordinasi Lintas Sektor di Daerah
 - 8 Aksi Konvergensi

2 DAK Kesehatan

- Peningkatan cakupan & *compliance* intervensi spesifik, seperti tablet tambah darah, vit. A, makanan tambahan, imunisasi

3 DAK Kesehatan Sub-bidang KB

- Penguatan kualitas keluarga & KB

4 DAK Sanitasi & Air Minum

- Peningkatan cakupan pada desa/kelurahan prioritas di 12 provinsi

5 BOP PAUD

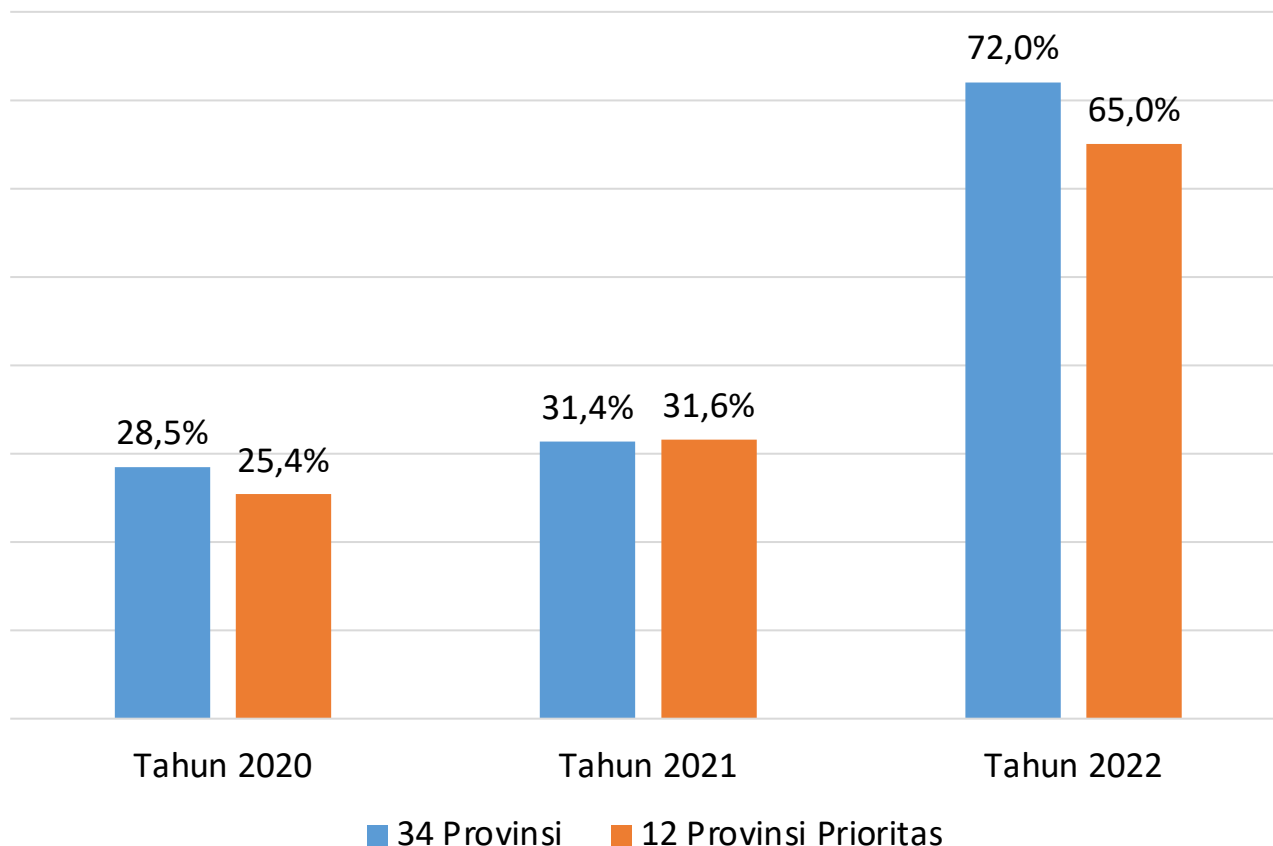
- Peningkatan kualitas pembelajaran PAUD
- Peningkatan kapasitas guru

6 Pangan Lestari

- Pemanfaatan Pekarangan Lestari

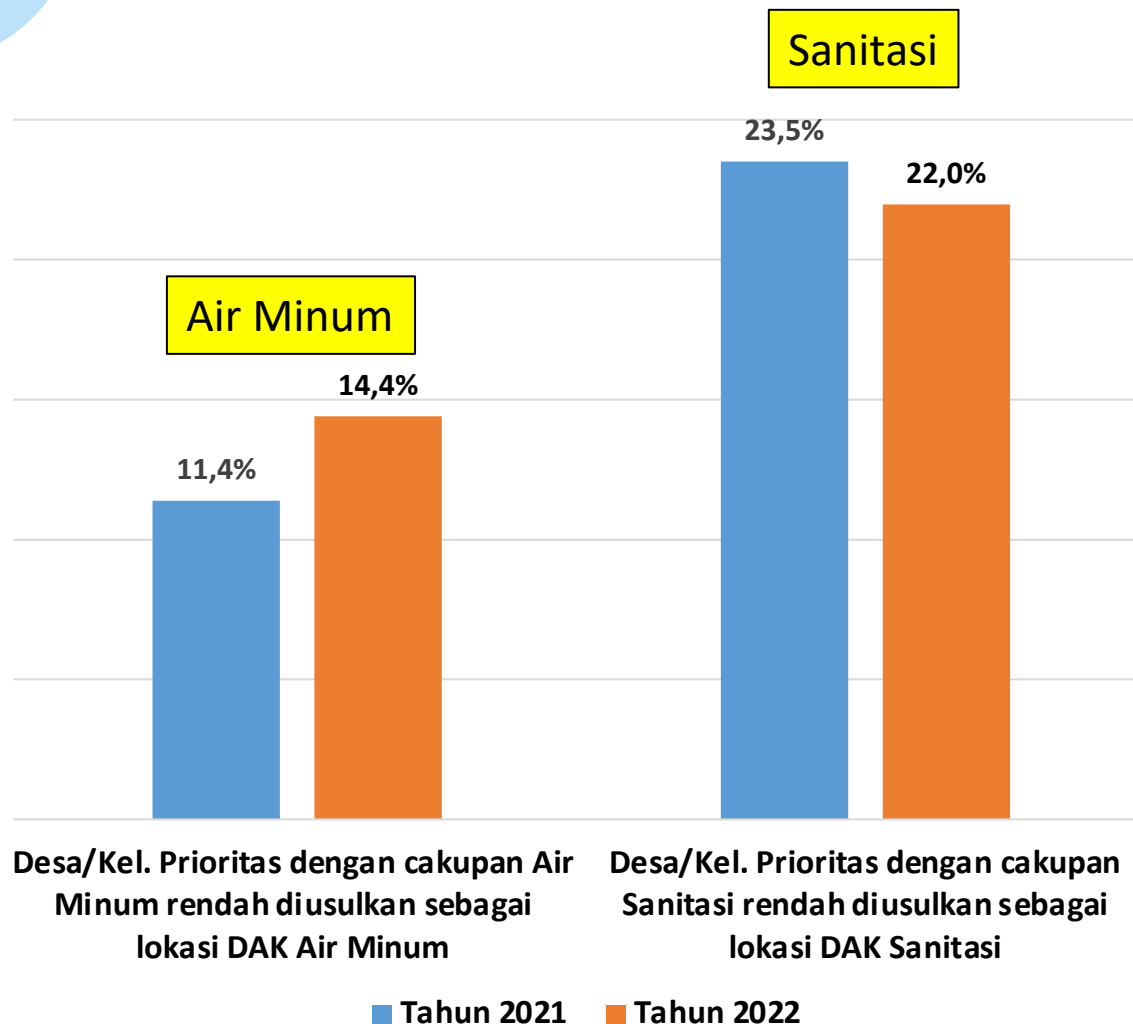
Perkembangan Jumlah Daerah yang mendapatkan Alokasi Seluruh Bidang DAK Stunting

Persentase Kabupaten/Kota Lokus Mendapat Alokasi Seluruh Bidang DAK Stunting



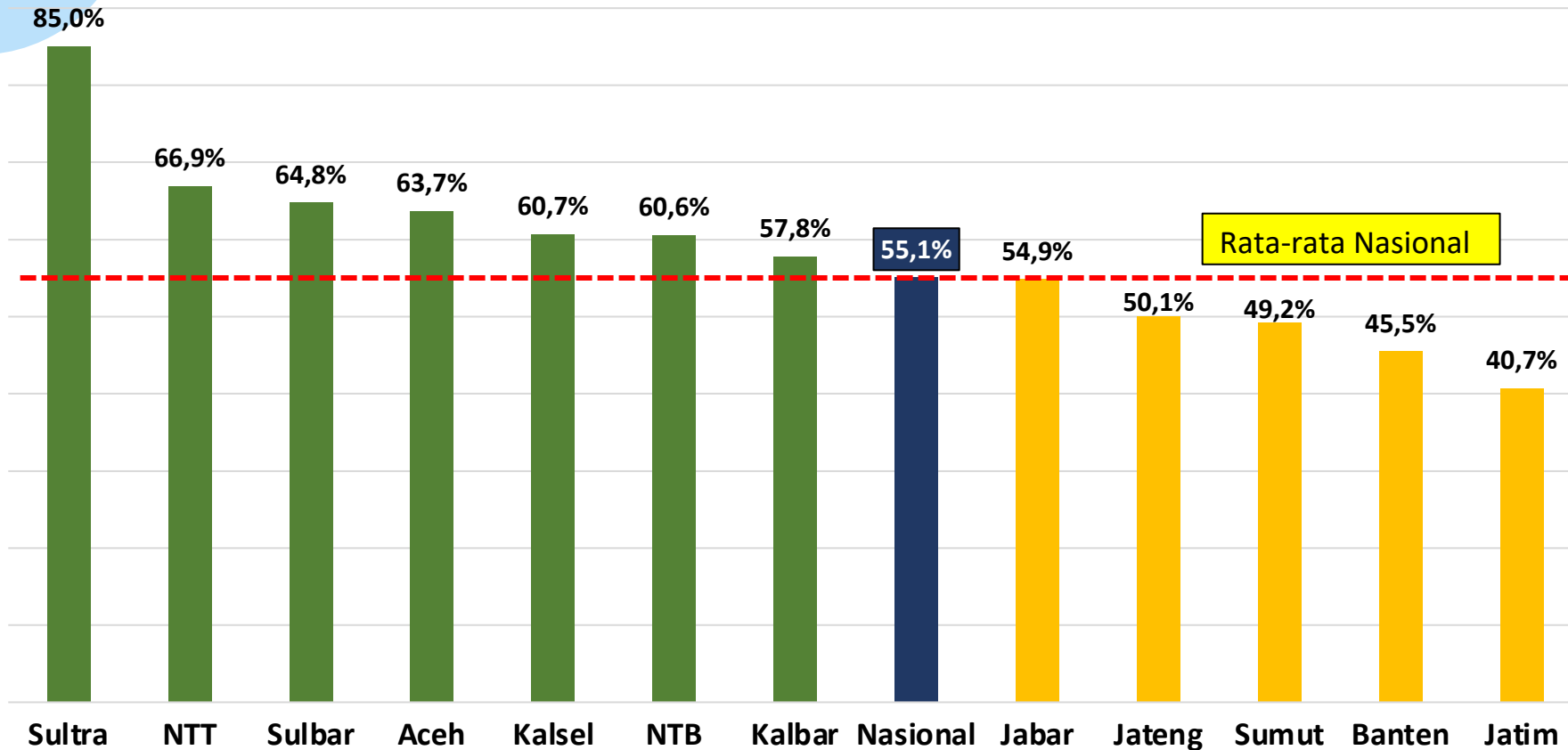
- Perencanaan DAK Stunting tahun 2022 yang terintegrasi di kabupaten/kota lokus **menunjukkan peningkatan.**
- Persentase jumlah **kabupaten/kota lokus yang mendapat alokasi seluruh bidang DAK Stunting** menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 31,4% pada tahun 2021, **menjadi 72,0% pada tahun 2022.**
- Kenaikan persentase ini masih **belum diikuti dengan pemanfaatan desa/kelurahan prioritas hasil analisis situasi** sebagai lokasi usulan DAK Stunting.
- Persentase kabupaten/kota lokus yang mendapat alokasi seluruh bidang DAK Stunting di 12 Provinsi prioritas yaitu 65% **masih di bawah rata-rata nasional 72%.**

Belum Selarasnya antara Desa Prioritas Stunting yang diusulkan Pemda **dengan Desa yang diusulkan mendapat DAK**



- Pemda **belum memanfaatkan** secara optimal desa/kelurahan prioritas hasil analisis situasi **sebagai lokasi usulan DAK Air Minum dan Sanitasi.**
- Sebagian besar usulan lokasi DAK Air Minum dan Sanitasi adalah **bukan desa/kelurahan prioritas atau desa/kelurahan prioritas dengan cakupan air minum/sanitasi yang memadai.**

Perkembangan Realisasi Anggaran DAK Stunting Lintas Sektor Tahun 2021



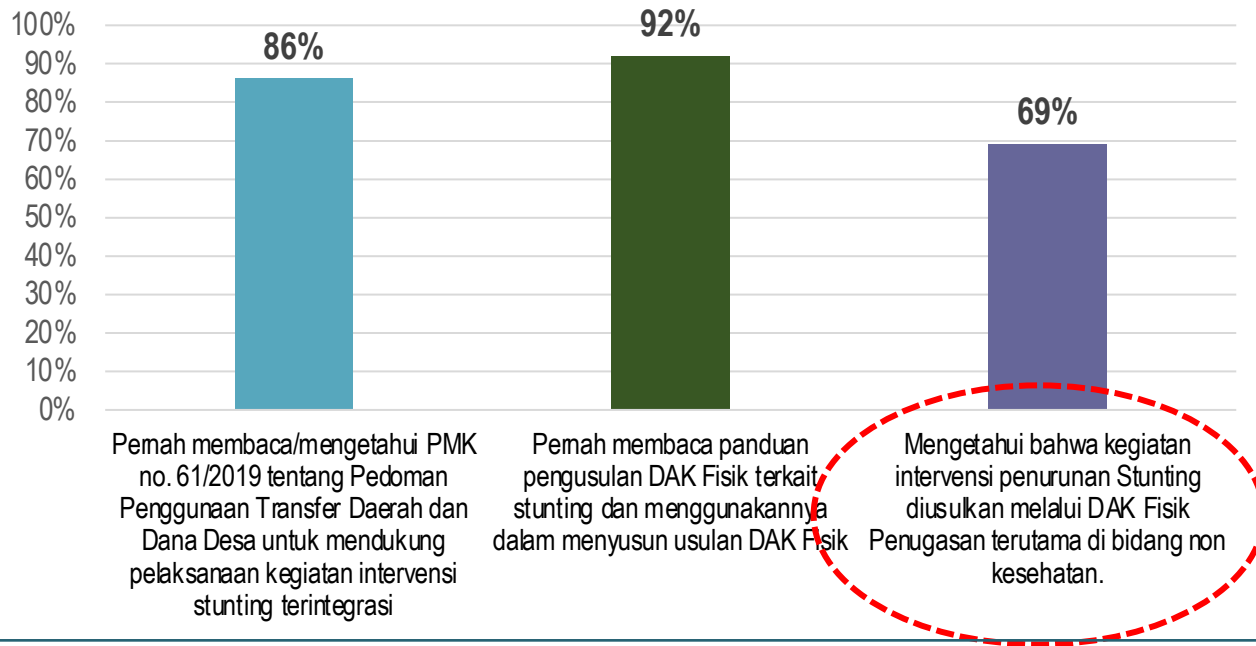
Sumber : Direktorat Transfer Khusus, Kemenkeu.

Status per tanggal 13 April 2022

- Data realisasi masih **menunjukkan tingkat yang rendah**
- Persentase progres penyerapan DAK di Provinsi Sulawesi Tenggara secara nasional merupakan yang tertinggi.
- Progres penyerapan semua provinsi di pulau jawa berada di bawah rata-rata nasional.
- Penyerapan **rata-rata nasional 55,1%**, terdiri dari **79,3% DAK Fisik** dan **39,0% DAK Nonfisik**

Pemahaman yang Belum Merata dalam Konsep Lintas Sektor Pelaksanaan DAK Stunting di Daerah

Pemahaman Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan DAK Penurunan *Stunting*



Pemanfaatan BOK *Stunting* untuk Dukungan Pembiayaan Koordinasi Konvergensi

- Bappeda mengetahui BOK *Stunting* (95%)
- Bappeda yang mengetahui BOK *Stunting* diprioritaskan untuk konvergensi lintas sektor (89%)
- Bappeda dapat memantau perkembangan pemanfaatan BOK *Stunting* (61%)

Poin Penting :

1. Belum merata pemahaman bahwa **skema DAK Stunting lintas sektor terintegrasi lintas bidang DAK**
2. **Perencanaan DAK Stunting di daerah masih sektoral** belum didasarkan pada hasil analisis situasi 8 Aksi Integrasi
3. **Belum semua Bappeda memahami adanya BOK Stunting** untuk pelaksanaan dan pengendalian 8 aksi integrasi lintas sektor

Kebijakan DAK Lintas Sektor DAK Penurunan Stunting Tahun 2023

1

DAK Fisik dan Non-Fisik **Kesehatan:**

- Penyediaan alat antropometri
- **Surveillans dan Pemantauan Gizi**
- Penyediaan Obat Gizi (TTD dan Vitamin A)
- Pengembangan **PMT Lokal**

2

DAK Sub-bidang KB:

- **Prasarana KB**
- Operasional pelayanan KB dan Pendidikan Keluarga

3

DAK Sanitasi dan DAK Air Minum:

- Penyediaan sarana air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan pipa
- Pembangunan **Septic Tank dan IPAL**

4

BOP PAUD:

- **Sanitasi Sekolah dan Makanan Tambahan**
- **Pelatihan guru PAUD**
- **Penyediaan sarana edukasi PAUD**

5

DAK Pertanian:

- Pemanfaatan **pekarangan lestari** untuk tanaman pangan hortikultura

6

Operasional *Stunting* di DAK KB:

- **Pendampingan keluarga balita *stunting*** untuk efektivitas intervensi *stunting*
- **Koordinasi konvergensi** lintas sektor di daerah

DAK akan lebih difokuskan untuk intervensi khusus pada **12 provinsi prioritas khusus** (akan ditetapkan oleh Menteri PPN)

Lokasi Intervensi yang Fokus dan Prioritas 2023

Lokasi Lintas Sektor Perencanaan DAK Th 2023:

1. DAK Fisik

- Semua menu dibatasi pada seluruh Kab/Kota di 12 Provinsi
- Khusus untuk lokus di tingkat desa, secara prinsip seluruh desa di wilayah Kab/Kota di 12 provinsi dapat menjadi lokus prioritas **dengan prioritas pada desa dengan capaian intervensi rendah**

2. DAK Non Fisik:

- Lokus lebih leluasa sehingga memungkinkan untuk dialokasikan pada Kab/Kota **di luar** 12 Provinsi Prioritas Khusus
- Skala prioritas dapat mengacu pada rencana lokus pada DAK Fisik diatas

No.	Provinsi	Prevalensi <i>Stunting</i> (%)	Estimasi Jumlah Balita <i>Stunting</i> (orang)
1	NTT	37,8	218.443
2	Sulawesi Barat	33,8	44.760
3	Aceh	33,2	168.777
4	NTB	31,4	153.826
5	Sulawesi Tenggara	30,2	80.003
6	Kalimantan Selatan	30,0	110.881
7	Kalimantan Barat	29,8	131.466
8	Jawa Barat	24,5	968.148
9	Jawa Timur	23,5	656.449
10	Jawa Tengah	20,9	510.646
11	Banten	24,5	268.226
12	Sumatera Utara	25,8	348.889

Penguatan DAK Stunting sebagai Program Lintas Sektor



1. **Memfokuskan DAK Stunting di 12 Provinsi** dengan Beban Stunting tertinggi untuk penurunan signifikan
2. **Memastikan kesiapan Pemda** terutama dalam perencanaan dan pengusulan sehingga selaras antara rencana intervensi dan pembiayaan DAK → **Melalui BIMTEK**
3. Pemda memastikan bahwa perencanaan hingga monitoring **DAK Stunting dilaksanakan secara lintas sektor**
4. **Penjelasan tentang aspek stunting** sebagai bagian Petunjuk Teknis / Petunjuk Operasional DAK setiap bidang



Terima Kasih